

PROBLEMA PENDIDIKAN DI PERDESAAN

Oleh :

Dr. Ir. Ali Hanapiah Muhi, MP

Sumber daya manusia adalah merupakan faktor yang paling utama dalam pembangunan suatu bangsa. Manusia sebagai sumber daya yang memiliki peran ganda dalam proses pembangunan. Manusia sebagai objek pembangunan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Perlu dipahami bahwa sumber daya manusia merupakan dasar bagi suatu bangsa. Modal dan sumber daya alam adalah merupakan faktor-faktor produksi yang pasif, manusia merupakan faktor produksi yang aktif. Manusia dikatakan sebagai faktor produksi yang aktif, karena memiliki kemampuan mengumpulkan modal, mengeksploitasi sumber-sumber daya alam, membangun organisasi-organisasi sosial, ekonomi, dan politik serta melaksanakan pembangunan. Negara yang tidak dapat membangun dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan kecerdasan rakyatnya dan tidak mampu memanfaatkannya secara efektif dalam perekonomian nasional, maka akan sangat sulit atau bahkan tidak akan bisa mengembangkan apa-apa. Bagaimana dengan bangsa Indonesia ? Jangan-jangan kondisi ini tengah melanda bangsa kita. Wallahu'alam.

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah tidak akan menjamin mampu menopang dan memberikan manfaat yang optimal secara berkelanjutan bagi masyarakatnya, jika tidak mendapat penanganan/pengelolaan yang optimal dan berkelanjutan. Untuk dapat melakukan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam secara efektif, optimal dan berkelanjutan akan sangat tergantung pada manusia sebagai pengelolanya. Jika sumber daya alam yang melimpah dikelola oleh manusia yang tidak memiliki kemampuan (pengetahuan dan keterampilan)

yang memadai, maka dapat diprediksi bahwa sumber daya alam yang dikelola tidak akan mampu memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bahkan sebaliknya, suatu saat sumber daya alam tersebut akan menjadi musnah dalam waktu yang relatif cepat. Pada akhirnya, sumber daya manusia yang akan menentukan karakter dan langkah pembangunan suatu bangsa/negara, bukan modal dan sumber daya alam lainnya.

Begitu penting dan strategis arti keberadaan sumber daya manusia dalam pembangunan nasional dan regional (termasuk daerah dan desa). Maka pengembangan kualitas sumber daya manusia harus mendapat perhatian yang utama dalam pembangunan bangsa. Jika tidak, maka bangsa tersebut akan menjadi bangsa yang terbelakang atau paling tidak akan sulit meraih kemajuan-kemajuan yang berarti.

Kita dapat menyimak dari sejarah dunia, bahwa negara-negara maju yang saat ini menguasai dunia (melalui ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, perekonomian dan politik) adalah negara/bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Sebuah contoh adalah Negara/bangsa Jepang :

“Pada tahun 1945 Jepang dibombardir oleh sekutu pada Perang Dunia II. Negara ini mengalami kehancuran yang luar biasa secara ekonomi. Akan tetapi tidak secara moral dan semangat nasionalisme. Begitu Perang Dunia II usai, Jepang segera mulai berbenah diri. Para kaum muda Jepang mengikuti pendidikan di berbagai negara maju untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu perhatian pemerintahnya terhadap bidang pendidikan dalam negeri juga sangat besar, dengan membangun berbagai fasilitas pendidikan dan menguatkan anggaran sektor pendidikan dalam program pembangunannya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada beberapa dasawarsa belakangan ini perekonomian Jepang mulai bangkit bahkan berbagai hasil industrinya menguasai pasaran internasional termasuk di wilayah Amerika Serikat”.

Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul "Kebudayaan, Mentalitas

dan Pembangunan (1990)" menjelaskan tentang kesiapsiagaan bangsa Jepang dalam membangun. Menurut para ahli, diantaranya Ohkawa dan Rosovsky menyebutkan bahwa pada waktu pemimpin Jepang Meiji memulai pembangunan Jepang dalam tahun 1868, rakyat Jepang secara mental sudah jauh lebih siap untuk membangun. Sarjana yang bermutu, terutama bidang teknologi yang mendapat pendidikan di berbagai Universitas di Eropa (sebenarnya tidak jauh lebih banyak dari negara Indonesia pada awal periode pembangunan tahun 1969). Akan tetapi rakyat Jepang pada tahun 1868 bukanlah suatu negara yang rakyatnya masih 70 % dalam keadaan buta huruf seperti halnya Indonesia pada awal era pembangunan.

Mekanisme institusional yang prinsipil dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan manusia adalah sistem pendidikan formal dan non formal. Kesempatan-kesempatan perluasan pendidikan secara kuantitatif dan kualitatif yang segera akan memegang kunci pokok dalam pembangunan bangsa.

Meskipun demikian, bagi negara berkembang termasuk Indonesia pendidikan masih termasuk masalah krusial dan sensitif yang secara ekonomis sangat mahal. Berbagai kendala masih menghadang yang merupakan kumpulan momentum yang berasal dari berbagai sumber. Beberapa permasalahan dunia pendidikan kita antara lain permasalahan biaya pendidikan yang tinggi, keterbatasan dana anggaran di sektor pendidikan dari pemerintah terutama untuk pendidikan tinggi, belum adanya kurikulum yang dinilai benar-benar cocok bagi bangsa Indonesia dan berbagai permasalahan lainnya. Kondisi ini semakin rumit dengan adanya tingkat kemiskinan yang kronis, disparitas ekonomi antara si kaya dan si miskin yang semakin meluas, tingkat pengangguran yang semakin besar termasuk pengangguran intelektual terdidik.

Bagi sebagian kalangan dalam masyarakat Indonesia berkembang suatu anggapan yang kurang kondusif bagi pengembangan pendidikan. Anggapan tersebut dapat dikatakan sebuah anggapan yang keliru. Anggapan yang dimaksud adalah *"bersekolah atau pendidikan merupakan sarana untuk meraih keinginan untuk menjadi Pegawai Negeri"*. Sebenarnya anggapan ini tidak

sepenuhnya keliru/salah. Anggapan ini menjadi suatu anggapan yang keliru, manakala anggapan ini berkembang dalam masyarakat luas terutama di kalangan masyarakat pedesaan, dimana para orang tua (masyarakat umum) sangat menginginkan putra-putrinya setelah menyelesaikan pendidikan formal akan dapat diterima bekerja menjadi pegawai negeri atau bekerja di sektor pemerintahan lainnya. Seolah-olah bagi mereka bahwa bekerja bagi seorang yang terdidik adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri atau sektor pemerintahan. Apakah yang melatarbelakangi hal tersebut ? Untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif tentang hal tersebut, perlu adanya penelitian/kajian secara khusus.

Namun yang jelas, bahwa melalui serangkaian proses pendidikan akan mendapat peluang untuk meraih pekerjaan yang lebih baik. Peluang pekerjaan yang dimaksud bisa saja pada lembaga milik pemerintah, lembaga milik swasta atau sebagai wirausahawan. Lembaga wira usaha dalam arti kewirausahaan, dimana para insan terdidik/memiliki keterampilan yang tinggi dapat membuka atau menciptakan lapangan kerja baru dengan bekal utama pengetahuan dan keterampilan yang didapat dari pendidikan yang telah diperolehnya. Sebagai wirausahawan bukan saja menjadi sumber penghidupan bagi wirausahawan itu sendiri, akan tetapi juga dapat menjadi sumber penghidupan bagi banyak orang. Karena setiap usaha yang berkembang tentunya membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat menampung tenaga kerja baru.

Perlu diingat bahwa menggantungkan harapan hanya satu-satunya pada sektor pemerintahan atau menjadi pegawai negeri adalah suatu hal yang sangat keliru. Fakta memperlihatkan bahwa kemampuan lembaga-lembaga pemerintah dalam menampung lulusan lembaga pendidikan adalah sangat terbatas. Justeru terjadi penurunan dari tahun ke tahun dengan diterapkannya secara berturut-turut kebijakan *zero growth* dan *minus growth* dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri. Kebijakan *zero growth* adalah kebijakan pemerintahan untuk merkerut calon pegawai negeri sipil dengan cara merekrut calon pegawai negeri dalam jumlah yang sama dengan jumlah pegawai negeri yang pensiun pada tahun yang bersangkutan. Kebijakan *minus growth* adalah kebijakan pemerintah untuk menerima calon pegawai negeri sipil dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding

dengan jumlah pegawai negeri yang pensiun pada tahun yang bersangkutan.

Adalah suatu pekerjaan rumah bagi kita semua, untuk menjelaskan kepada masyarakat terutama para orang tua di pedesaan. Bahwa lapangan kerja bagi lulusan suatu jenjang pendidikan bukanlah hanya pegawai negeri. Bekerja di sektor selain pegawai negeri adalah juga merupakan hal dan pilihan yang terhormat. Hal ini akan menghindari bias dalam masyarakat pedesaan yang menganggap bahwa kegagalan meraih pekerjaan di sektor pemerintahan merupakan salah satu kegagalan dalam pendidikan.

Perlu dicermati sinyalemen yang dikemukakan oleh Todaro (1983), bahwa di negara-negara sedang berkembang muncul dan berkembang kesadaran bahwa perluasan pendidikan formal tidak selalu sama dengan kesempatan belajar. Kepentingan yang eksklusif dari para anak didik dan guru terhadap pemilikan ijazah sekolah dan pendidikan yang lebih tinggi tidak perlu dihubungkan dengan kemampuan murid yang telah diperbaiki (peningkatan kemampuan murid) untuk melakukan pekerjaan produktif. Pendidikan hampir seluruhnya berorientasi pada persiapan untuk menjadi pegawai/bekerja pada sektor perkotaan modern. Hal ini dapat mengubah aspirasi-aspirasi para anak didik, terutama sekali pada sekolah menengah. Kondisi ini bisa pula mengurangi sumber-sumber yang langka dalam aktivitas sosial dan produktif seperti menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang demikian lebih banyak merupakan hambatan daripada sebagai perangsang/stimulus bagi pembangunan.

Salah satu problematika pendidikan yang penting bagi negara kita adalah masih tingginya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah atau tidak bersekolah karena alasan ekonomi dan sosial lainnya.

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan diantara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "*standar*" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan (Anonim, *tt.*), yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel : Usia Standar di Setiap Jenjang Pendidikan

Jenjang	Kelompok usia
SD	7 - 12 tahun
SMP	13 - 15 tahun
SMA	16 - 18 tahun
Perguruan Tinggi	19 tahun keatas

Penjelasan APK dan APM. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Rata-rata rentang APK di Indonesia dari hasil data SUSENAS 10 tahun terakhir SMP antara 50% sampai 80%, dan SMA masih relatif rendah yaitu antara 30% sampai 50%.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Rentang APM di Indonesia dari hasil tabulasi data Susenas 10 tahun terakhir untuk SD berkisar antara 50 sampai 95 persen, SMP antara 50 sampai 70 persen, dan SMA antara 20 sampai 50 persen.

Selain itu, persentase penduduk (remaja/dewasa) umur 15 tahun ke atas yang buta huruf masih tergolong tinggi. Meskipun sudah ada upaya untuk mengatasi hal tersebut. Penduduk yang buta huruf diperkirakan masih cukup tinggi, karena masih tingginya tingkat pertumbuhan penduduk dan masih tingginya jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan anak terlantar.

Pendidikan adalah merupakan proses belajar yang dilakukan secara radar baik formal maupun non formal. Masalah yang dihadapi dalam bidang pendidikan adalah berlangsungnya pendidikan yang kurang bermakna bagi pengembangan pribadi dan watak peserta didik yang berakibat pada hilangnya kepribadian dan kesadaran akan makna hakiki kehidupan. Mata pelajaran yang berorientasi akhlak dan moralitas serta pendidikan agama kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengamalan untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari. Karenanya masyarakat cenderung untuk tidak memiliki kepekaan yang cukup untuk membangun toleransi dan kebersamaan, khususnya dalam menyadari keberadaan masyarakat yang majemuk. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi belum dimanfaatkan secara berarti.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Todaro (1983) mengemukakan bahwa berbagai faktor awal dari kehidupan seorang anak turut menentukan prestasinya dalam belajar dan dalam kehidupannya kelak setelah menjadi dewasa. Faktor-faktor tersebut adalah Kesehatan dan kebiasaan si ibu selama mengandung, kesehatan anak itu sendiri, keadaan gizi/makanan selama tahun-tahun pertama pertumbuhannya, kondisi kehidupan keluarga, dan lain-lain. Sedikitnya ada empat faktor yang penting dalam menentukan kemampuan anak dalam belajar :

1. **Lingkungan keluarga**, termasuk di sini tingkat penghasilan dan pendidikan orang tua, kondisi rumah/tempat tinggal, jumlah anak dalam keluarga dan lain-lain.
2. **Interaksi kelompok**, yaitu jenis anak-anak yang bergaul atau berhubungan dengan individu anak tersebut.
3. **Personalitas/kepribadian**, yaitu kemampuan, kecakapan dan

kepandaian yang memang diwarisi anak tersebut.

4. **Makanan bergizi dan kesehatan** pada waktu awal pertumbuhannya (bayi).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ahli, bahwa pendidikan adalah merupakan suatu proses belajar yang dilakukan secara sadar yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pembentukan kepribadian.

Bagaimana hubungan pendidikan dan mentalitas pembangunan suatu negara/bangsa ? Berkaitan dengan itu, Koentjaraningrat (1990) mengajukan pertanyaan penting, yaitu "*Apakah mentalitas pembangunan itu ?*" Beliau mengemukakan bahwa untuk suatu jawaban yang tepat, secara logis terlebih dahulu memerlukan suatu bayangan ke depan mengenai bentuk masyarakat seperti apa yang kita ingin capai dengan pembangunan kita. Model dari masyarakat-masyarakat (negara/bangsa) yang sekarang sudah maju tidak mungkin dapat kita contoh begitu saja. Yang jelas, bahwa kita harus berusaha untuk menjadi lebih makmur dari sekarang, harus berusaha untuk menghasilkan karya yang lebih dapat kita banggakan. Oleh karena itu, kita wajib memiliki syarat suatu nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, memiliki suatu sifat berhemat, suatu pandangan hidup yang menilai tinggi *achievement* dari karya, suatu nilai budaya yang kurang berorientasi vertikal, dan suatu sikap lebih percaya pada kemampuan sendiri.

Pembangunan desa ditinjau dari konteks transformasi struktur ekonomi dan sosial, institusi-institusi, hubungan-hubungan dan proses-proses di daerah pedesaan yang akan dicapai dalam jangka panjang. Tujuan-tujuan pembangunan desa tidak bisa hanya semata-mata terbatas pada pertumbuhan ekonomi saja. Lebih dari itu, harus ditinjau berdasarkan keseimbangan pembangunan ekonomi dan sosial. Sampai saat ini pembangunan pertanian merupakan salah satu komponen yang dominan di negara kita. Karena lebih dari 60 persen populasi di daerah pedesaan menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun demikian pembangunan desa haruslah dilihat dari perspektif yang lebih jelas.

Berkaitan dengan peran dan fungsi pendidikan sebagai transmisi (pengalihan) kultur dan sebagai pembentuk kepribadian. Maka, pendidikan merupakan suatu hal yang amat penting dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pembentukan kepribadian bangsa, termasuk dalam hal pembentukan dan pembinaan mentalitas pembangunan. Dalam hal ini pendidikan dasar yang telah menyentuh hampir semua pelosok desa memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, pendidikan dasar semestinya harus mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Pendidikan dasar di negara sedang berkembang termasuk Indonesia masih menghadapi permasalahan-permasalahan mendasar. Seringkali tidak senada dengan kebutuhan masyarakat di pedesaan. Permasalahan-permasalahan pendidikan di pedesaan negara-negara berkembang, antara lain

1. Sebagian besar anak-anak di negara sedang berkembang tinggal dan bersekolah di daerah-daerah pedesaan.
2. Umumnya anak-anak tersebut barangkali hidup dari penghasilan di daerah pedesaan, apakah dari sawah, kebun atau dari upah dan sebagainya.
3. Pendidikan di pedesaan sedikit sekali memberikan pengetahuan, skill (keterampilan), dan gagasan-gagasan baru yang perlu untuk bekerja secara efisien di lingkungan pedesaan (pertanian, kesehatan, makanan sehat dan bergizi, pengembangan kemasyarakatan dan lain-lain).
4. Pendidikan dasar biasanya berusaha mempersiapkan murid-murid melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dengan didominasi latihan membaca, menulis dan berhitung ketimbang latihan berfikir dan praktek menyelesaikan problema kehidupan.

Sementara itu, fenomena yang ada adalah

1. Masih tingginya jumlah anak-anak putus sekolah atau tidak bersekolah karena alasan ekonomi dan alasan sosial lainnya.
2. Masih relatif terbatas jumlah anak-anak dari pedesaan yang berhasil masuk sekolah lanjutan menengah.

3. Dari jumlah mereka yang berhasil menyelesaikan pendidikan sekolah lanjutan menengah, sebagian besar tidak dapat memasuki Perguruan Tinggi, sehingga peluang mereka untuk dapat meraih pekerjaan di sektor modern di perkotaan sangat terbatas (Todaro, 1983).

Sistem pendidikan negara kita lebih memfokuskan pada mempersiapkan anak didiknya untuk bisa lulus standar kualifikasi ujian guna melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan kurikulum yang berkaitan dan diperlukan bagi sebagian besar anak didik yang mendambakan hidup dan bekerja di daerah pedesaan (mengelola sumber daya alam desa secara optimal) kurang mendapat perhatian. Sehingga pendidikan di pedesaan kurang memberikan kontribusi dalam rangka memperbaiki produktivitas pertanian dan ekonomi di daerah pedesaan. Pendidikan kurang membantu masyarakat pedesaan untuk bisa bekerja lebih efektif dalam lingkungan desanya. Seorang ahli pendidikan ekonomi Philip H. Coombs *dalam* Todaro (1983) memberikan tipologi pendidikan yang dibutuhkan untuk remaja, anak-anak, pria dan wanita ke dalam empat kelompok utama, sebagai berikut :

1. **Pendidikan umum atau pendidikan dasar;** mencakup membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan dasar tentang ilmu lingkungan dan lain-lain, sebagaimana yang telah diusahakan dan harus dicapai oleh pendidikan dasar dan menengah.
2. **Pendidikan untuk perbaikan keluarga;** terutama dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan, *skill* (keterampilan), dan sikap-sikap yang berguna dalam usaha memperbaiki kualitas kehidupan keluarga tentang masalah-masalah kesehatan, gizi, pemeliharaan rumah, anak, keluarga berencana dan lain-lain.
3. **Pendidikan untuk perbaikan masyarakat;** dimaksudkan untuk memperkuat proses-proses dan lembaga-lembaga nasional dan lokal melalui pengajaran mengenai pemerintahan setempat dan pemerintahan nasional, koperasi, kemasyarakatan dan lain-lain.
4. **Pendidikan okupasional pekerjaan/jabatan;** yang lebih dimaksudkan

untuk menunjang dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang berhubungan dengan berbagai kegiatan ekonomi dan berguna bagi kehidupan di pedesaan.

Jika dikaitkan dengan empat kelompok pendidikan di atas, di pedesaan Indonesia sampai saat ini baru kelompok *pendidikan umum atau pendidikan dasar* yang nampaknya sudah dilakukan. Kelompok pendidikan lainnya masih harus mendapat pengkajian dan perhatian yang lebih serius di masa mendatang, guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di era otonomi daerah. Yang terpenting adalah bagaimana mengupayakan sinkronisasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dan potensi setempat dan nasional.****

Penulis : Dr. Ir. Ali Hanapiah Muhi, MP
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Jawa Barat, 2011.